

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

Abdul Rahmat

e-mail: infoabdulrahmat@gmail.com

PLS FIP Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi program pendidikan kesetaraan Paket B untuk mendukung wajar dikdas 9 tahun di Kabupaten Gorontalo dengan lokasi di Sanggar Kegiatan Belajar. Penelitian berlangsung dari bulan April 2011 sampai dengan Februari 2012. Desain penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan rancangan studi multi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik bola salju (*snowball sampling*) yaitu melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Untuk analisis kasus individu menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang berkaitan dengan segi isi program, proses belajar membelajarkan, struktur program, dan sumber belajar

Kata-kata kunci: pembinaan profesionalisme, program, kualitas pembelajaran

EVALUATION OF EQUIVALENCY EDUCATIONAL PROGRAM OF PACKAGE B

Abstract: *The purpose of this research was to discover how the equivalency educational program of B package to support the the nine years compulsory educational program in Gorontalo District. The research conducted as from April 2011 through February 2012, used phenomenology approach and design multi cases. The data were collected using deep interview, participation observation, and documentation study and analysed employing case individual analysis and analysis multy cases. The result of this research is related to the program content, learning and teaching process, program structure, and learning resources.*

Keywords; professionalism, program, quality, learning

PENDAHULUAN

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di provinsi Gorontalo, pulau Sulawesi yang dibentuk pada 26 November 1673 (16 Sya'ban 1084 Hijriah). Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota semula Isimu, lalu dipindahkan ke Limboto pada tahun 1978. Sampai dengan awal tahun 2003, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami dua kali pemekaran, *pertama* antara Kabupaten Gorontalo (induk) dan Kabupaten Boalemo (hasil pemekaran 1999) dan setelah itu ditambah dengan Kabupaten Bonebolango (hasil pemekaran 2003). Kabupaten Gorontalo hingga Maret 2010 terdiri atas 12 kelurahan dan 154 desa. Sementara itu, kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo hingga bulan Maret 2010 ada 17 kecamatan, yaitu: Asparaga, Batudaa, Batudaa Pantai, Biluhu, Boliyohuto, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Pulubala, Tabongo, Telaga, Telaga

Biru, Telaga Jaya, Tibawa, Tilango, dan Tolangohula. Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo secara umum menunjukkan keberhasilan. Namun demikian, disadari bahwa pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dari satu kondisi menuju kondisi berikutnya yang sangat dipengaruhi oleh faktor, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya (Zubaedi, 2007:130).

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Gorontalo, khususnya pendidikan dasar dan menengah telah berjalan, meskipun keberhasilan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Husain, 2011:13). Angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD/MI) sudah di atas 100 persen, tetapi angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan sekolah menengah pertama (SMP/MTS), baik angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) masih jauh di bawah jauh dari 95%. Apalagi tingkat sekolah

menengah atas dan madrasah aliyah (SMA/MA), jauh di bawah 50%. Maknanya bahwa program wajib belajar 9 tahun belum tuntas, sebab indikator ketuntasan adalah 95% ke atas. Demikian pula dengan buta aksara penduduk usia 10 - 44 masih di atas 5%, yaitu, tahun pada tahun 2006 sejumlah 10.472 orang (7,2 persen), tahun 2007 sejumlah 10.272 orang (7 persen), dan pada tahun 2008 sejumlah 8991 orang (6,8%). Juga pada tahun 2008 angka putus sekolah usia 7 - 12 tahun sebesar 7.087 orang dari 60.802 orang, usia 13 - 15 tahun 6.811 orang dari 32.243 orang, dan usia 16 - 18 tahun 5.187 orang dari jumlah seluruhnya 24.907 orang. Lama studi yang ditempuh pada umumnya masih berada pada rata-rata kelas VI atau 6,5 tahun.

Permasalahan pembangunan pendidikan terutama dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dipaparkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberdayakan semua pemangku kepentingan untuk mengambil peran yang berarti dalam pembangunan pendidikan. Penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun merupakan program bersama antara pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, dan legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk mengsucceskan program nasional tersebut.

Indikator utama penuntasan Wajib Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Kabupaten Gorontalo sebesar 75% pada tahun 2009/2010. Pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan layanan pendidikan anak usia 13-15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/yang sederajat. Sampai saat ini upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun masih digencarkan baik oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa. Data jumlah anak usia sekolah dasar yang tertampung dalam pendidikan formal dan nonformal baru mencapai sekitar 78% dari seluruh jumlah anak usia SD di Kabupaten Gorontalo. Sisanya, sampai saat ini belum terlayani di sekolah formal maupun nonformal (Data Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada evaluasi program pelaksanaan program kejar paket B untuk mendukung Wajib Dikdas 9 tahun di Kabupaten Gorontalo. Untuk

mendapatkan fakta dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis permasalahan tersebut, dilakukan penulis melakukan pendalaman teori-teori terkait (*library research*) serta melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. *Pertama*, masih banyaknya usia produktif wajar dikdas di Kabupaten Gorontalo. *Kedua*, pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B yang belum optimal. *Ketiga*, tujuan program pendidikan kesetaraan paket B yang kurang mengarah pada hasil belajar. *Keempat*, belum meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs. *Kelima*, jumlah angka DO dan tidak melanjutkan cukup besar. *Keenam*, penduduk buta aksara usia > 15 tahun masih banyak di Kabupaten Gorontalo, serta jumlah pengangguran terbuka masih banyak pada tahun 2011.

Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana evaluasi program pelaksanaan program kejar paket B untuk mendukung Wajib Dikdas 9 tahun di Kabupaten Gorontalo?”

Secara umum, penelitian ini bertujuan menggambarkan, mendalami, dan menemukan evaluasi program pendidikan kesetaraan Paket B yang efektif dan efisien untuk mendukung Wajib DIKDAS 9 Tahun di Kabupaten Gorontalo. Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat dirinci pada: (1) penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket B, (2) tujuan program pendidikan kesetaraan paket B, (3) strategi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B, (4) metode pelaksanaan evaluasi program pendidikan kesetaraan paket B, (5) instrumen pelaksanaan evaluasi program pendidikan kesetaraan paket B, (6) cara dan metode penilaian hasil evaluasi program pendidikan kesetaraan paket B, (7) kriteria keberhasilan program pendidikan kesetaraan paket B, serta (8) faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas dalam mengembangkan kajian Pendidikan Kesetaraan, sehingga dapat dijadikan sumbangan konseptual bagi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B untuk mendukung Wajib Dikdas 9 tahun.

Untuk mendukung penelitian ini, beberapa bagian kajian teori yang digunakan antara lain: (1) manajemen pendidikan nonformal, (2) pendidikan kesetaraan, (3) wajib belajar 9 tahun, dan (4) model evaluasi program.

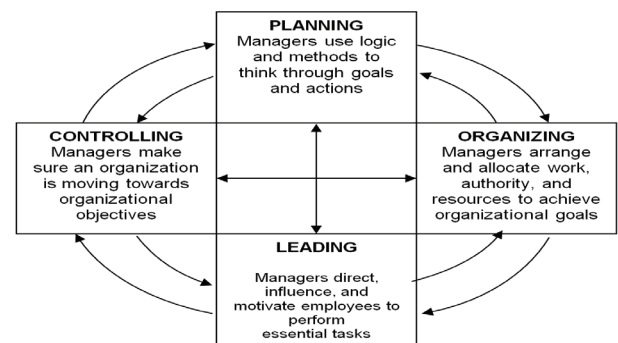
Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis

kuno *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. (Robbins & Coulter, 2007:90). manajemen dapat didefinisikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (Follet dalam Griffin, 2006:23). Selain itu, manajemen juga didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien (Griffin, 2006:23). Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Manajemen dapat dirumuskan sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi. Manajemen sebagai pelaksana utama organisasi dapat diartikan juga sebagai "*The process of planning, organizing, leading and controlling the work of organization members and of using all available organizational resources to reach stated organizational goals*" (Daft, 2003:5).

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu: (1) sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, dan (2) sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2003:5). Manajemen PNF pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi pendidikan nonformal. Definisi lain menyebutkan "*Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the use of resources to accomplish performance goals*". (Schermerhorn, 2005:15).

Dari uraian di atas, jelas bahwa sekalipun ada perbedaan dalam pengelompokan fungsi-fungsi manajemen, namun secara keseluruhan manajemen pendidikan nonformal menggambarkan substansi yang sama, dimulai dengan perencanaan (*planning*) dan diakhiri dengan pengendalian (*controlling*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.



Pendidikan kesetaraan, merupakan salah satu dari pendidikan nonformal (PNF) yang mencakup program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA (Kamil, 2009:82). Program ini menekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Direktorat Kesetaraan Dirjen PNFI sekarang memberikan kebijakan bahwa ada tiga spektrum yang perlu dilaksanakan, yaitu (1) spektrum KMA (Kesetaraan Murni Akademik), (2) KIV (Kesetaraan Integrasi Vokasi, dan (3) KMV (Kesetaraan Murni Vokasi). Ketiga spektrum tersebut diharapkan dapat dilaksanakan untuk menjawab perubahan dan perkembangan jaman saat ini (Petunjuk Teknis PNF, 2007)

Pendidikan kesetaraan memberikan tempat dan melayani pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, anak DO, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, warga masyarakat lain yang membutuhkan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itu diperlukan diversifikasi layanan pendidikan kesetaraan yang sesuai dengan keragaman kondisi, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Pendidikan terbuka dan multimakna diwujudkan sebagai berikut:

Sistem pindah jalur (Multientri dan exit). Perpindahan jalur terjadi melalui proses penyeteraan yang akan menentukan kompetensi peserta didik dan kesesuaiannya terhadap darjah-darjah tertentu. Sistem ini memungkinkan peserta didik Pendidikan Kesetaraan dapat keluar dengan berbagai alasan (masalah ekonomi, bekerja, pindah tempat), tetapi mereka tetap berpeluang masuk kembali ke Pendidikan Kesetaraan dengan menunjukkan portofolio apabila keadaan telah memungkinkan. Sistem ini diberlakukan pada pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk mengakui hasil pembelajaran dan pengalaman peserta didik yang diperoleh baik secara mandiri maupun secara terkelola

dalam jalur pendidikan formal maupun informal. Secara sederhana sistem ini diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Sistem Derajah Pada Pendidikan Kesetaraan

Kelas	Derajah	Peringkat	Penyetaraan
7,8	3	Terampil 1	Paket B setara dengan kelas 8 pada SMP/MTs
9	4	Terampil 2	Paket B setara dengan kelas 9 pada SMP/MTs

Darjah 3 peringkat terampil 1 merupakan akhir dari 2 tahun pembelajaran pada Pendidikan kesetaraan Paket B. Artinya apabila seseorang mampu menguasai lebih dari 80% kompetensi darjah 3 secara tuntas maka ia sama dengan kelas 8 Paket B atau setara dengan kelas 8 SMP/MTs. Apabila baru mencapai lebih dari 60%, maka baru kelas 7 Paket B atau setara dengan kelas 7 SMP/MTs.

Darjah 4 peringkat terampil 2 merupakan akhir dari 3 tahun pembelajaran pada Pendidikan kesetaraan Paket B. Artinya apabila seseorang mampu menguasai lebih dari 80% kompetensi darjah 4 secara tuntas, maka sama dengan kelas 9 Paket B atau setara dengan kelas 9 SMP/MTs.

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pada tataran pelaksanaan dan ketuntasan, program wajib belajar juga mampu mengurangi angka kemiskinan. Melalui pendidik ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pendidikan adalah kekuatan", maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global.

Sisi pelaksanaan wajib belajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap

warga negara dapat mengembangkan diri lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) setiap warga negara mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta 4) memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun, ada tiga pendekatan yang dilakukan sebagai strategi pelaksanaannya, antara lain:

Pertama, pendekatan budaya. Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

Kedua, pendekatan sosial. Sosialisasi Wajar Dikdas 9 tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh nonformal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B.

Kedua, pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program wajar Dikdas 9 Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep "*universal basic education*" dan belum menerapkan konsep "*compulsary education*". Artinya, program wajib belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep "*compulsary education*", sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik.

Beberapa model yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam

pelaksanaan evaluasi program pembelajaran, yaitu 1) Kirkpatrick (*Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model*), 2) CIPP (*Context, Input, Proses, and Product*), dan 3) Stake (*Model Countenance*).

Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah *Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model*. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan (*training*) menurut Kirkpatrick (1998) mencakup empat level evaluasi, yaitu (1) *reaction*, (2) *learning*, (3) *behavior*, dan (4) *result*.

Konsep evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) pertama kali dikemukakan oleh Stufflebeam tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*The Elementary and Secondary*

Education Act). Konsep tersebut ditawarkan Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki.

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu (1) *description* (deskripsi) dan (2) *judgement* (pertimbangan), serta membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu (1) *antecedent* (program pendahulu/masukan/context), (2) *transaction* (transaksi/kejadian/process), dan (3) *outcomes* (hasil/result). Stake (dalam Tayibnapi, 2000:19) berpendapat menilai suatu program pendidikan harus melakukan perbandingan yang relatif antara program satu dan program yang lain, atau perbandingan yang absolut, yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu.

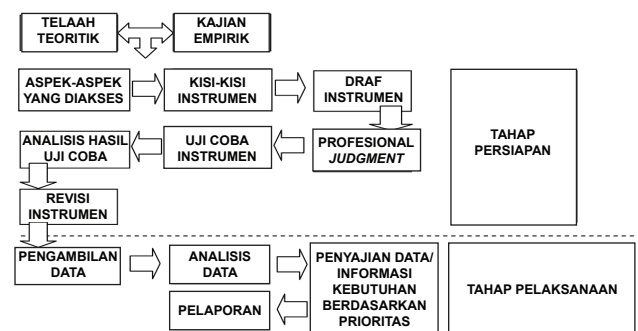
METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Gorontalo pada bulan April 2011 sampai dengan Februari 2012. Penentuan Kabupaten Gorontalo, sebagai tempat penelitian, didasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Gorontalo dengan masyarakat yang kompleks, berasal dari berbagai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Sifat dan karakter tersebut memberikan warna dalam pekerjaan dan aktivitas di lingkup Kabupaten Gorontalo. Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan yaitu kehidupan masyarakat Kabupaten Gorontalo, di antaranya: hubungan sosial, kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lain-lain, yang ikut mempengaruhi.

Untuk mendapatkan penelitian yang substantif, penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan paradigma naturalistik. menuntut dilaksakannya penelitian dalam konteks natural, dengan harapan makna yang diangkat dari penelitian tersebut memang dari konteksnya bukan dari prakonsep penelitiannya. Pemaknaan hasil *interview* dan atau observasi tidak dapat tidak terkait dengan waktu dan konteks tertentu (Neuman, 2000:87)

Penelitian ini menggunakan rancangan multikasus untuk mendapatkan dan membangun teori lebih khusus dan luas pada masing-masing kasus yang diteliti. Rancangan multikasus membutuhkan pembuktian lebih menantang dan temuan penelitiannya lebih kuat. Melalui rancangan ini, peneliti dapat menggambarkan dan menganalisis perilaku perorangan, dokumen dan atau fenomena

yang terdapat pada latar alami secara holistic (Walcott, 1994:81). Alur kegiatan asesmen kebutuhan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Bagan alur penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif adalah data yang banyak menggunakan kata-kata subjek, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini akan diambil data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Data-data yang dijaring melalui dokumen tentunya ada kaitan dengan fokus penelitian, di antaranya dokumen tentang (1) keberadaan warga belajar, (2) ketenangan, (3) sarana dan prasarana, (4) organisasi, (5) prestasi, (6) kepemimpinan dan manajemen kepala SKB, (7) proses pembelajaran, (8) tata tertib SKB, (9) kode etik, (10) simbol-simbol.

Sumber data penelitian adalah manusia dan nonmanusia, sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informant*) sumber data diambil secara purposif, dan tidak dilakukan secara acak. Teknik *purposive* digunakan untuk mengarahkan

pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan memilih informan yang benar-benar informasi dan masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Kedudukan peneliti sangat penting karena ia adalah sebagai perencana, sekaligus pelaksana pengumpul data, analisis dan penafsir data, dan sebagai pelapor hasil penelitiannya.

Teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian secara kontinyu dari awal sampai penelitian ini berakhir. Analisis data bersifat terbuka dan induktif, dalam arti terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data baru yang ma-

suk dan tidak dapat ditentukan lebih dahulu data apa yang diperlukan.

Setelah sejumlah data yang diperlukan diperoleh dan dianalisis, proses selanjutnya adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan maksud untuk menjaga keabsahan data yang telah diperoleh peneliti. Menurut Moleong, pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan, (5) kecukupan referensi, (6) kajian kasus negatif, (7) pengecekan sejawat, dan (8) audit. Untuk kepentingan penelitian ini, digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni antara lain: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, dan (3) triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Permasalahan utama anak putus sekolah di Kabupaten Gorontalo berbeda sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah. Di daerah perkebunan, permasalahan anak putus sekolah adalah karena (1) 63,6 rumah tangga kesulitan membiayai pendidikan anak karena faktor kemiskinan; (2) 53% tidak adanya motivasi sekolah, baik motivasi orang tua maupun anak; (3) 25,8 % karena bekerja sebagai pekerja keluarga. Kesulitan untuk membiayai sekolah juga menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Perluasan dan pemerataan pendidikan memberi tuntutan pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD/MI yang karena kendala tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan SMP/MTs reguler, disediakan pendidikan alternatif antara lain melalui SMP Terbuka. Peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dapat ditempuh dengan memberikan layanan pendidikan khusus yang memadai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Warga negara, baik pada usia sekolah maupun yang telah lewat usia sekolah, yang tidak dapat bersekolah karena persoalan keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, geografi, disediakan program pendidikan kesetaraan, melalui Paket B.

Pada temuan penelitian ini akan dijelaskan secara berurutan analisis lintas kasus terhadap kasus SKB Limboto dan SKB Batu Daa Kabupaten Gorontalo.

a. Penyelenggaraan diksetara paket B

Pada kasus 1, sistem darjah (peringkat) yang diberlakukan pada pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk mengakui hasil pembelajaran dan pengalaman peserta didik yang diperoleh baik secara mandiri maupun secara terkelola dalam jalur pendidikan formal maupun informal.

Pada kasus 1, dan kasus 2, dalam penelitian ini

diuraikan sebagai berikut: *pertama*, dari segi tujuan: (a) jangka pendek dan khusus, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang berfungsi bagi kehidupan masa kini dan masa depan; (b) kurang menekankan pentingnya ijazah, hasil belajar, berijazah atau tidak, dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau di masyarakat, dan (c) ganjaran diperoleh selama proses dan akhir program, dalam bentuk benda yang diproduksi, pendapatan, keterampilan.

Kedua, dari segi waktu: (a) relatif singkat, jarang lebih dari satu tahun, pada umumnya kurang dari setahun, lamanya tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik, persyaratan untuk mengikuti program ialah kebutuhan, minat, dan kesempatan waktu para peserta; dan (b) menekankan masa sekarang dan masa depan. Memusatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan teras peserta didik guna meningkatkan kemampuan sosial ekonominya dalam waktu bebas. Menggunakan waktu tidak penuh dan tidak terus menerus, waktu ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja atau berusaha.

b. Kurikulum pendidikan kesetaraan

Pada kasus 1, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket B disusun secara induktif, tematik dan berbasis kecakapan hidup, serta sesuai dengan konteks lokal dan global. Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan serta berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan.

Kurikulum dan silabus pendidikan dasar menekankan pada: (a) kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, (b) kecakapan berhitung, (c) kemampuan berkomunikasi, (d) kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan (e) kecakapan hidup dicapai melalui tema berikut:

Tahap awal penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan Kesetaraan dimulai dari analisis konteks, yaitu mengidentifikasi potensi satuan pendidikan secara menyeluruh, analisis peluang dan tantangan yang terkait dengan *stakeholder* pendidikan, serta analisis standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan pengembangan kurikulum.

c. Strategi pelaksanaan program diksetara paket B

Pada Kasus 1, dan Kasus 2, proses pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan pendekatan induktif, tematik, partisipatif (*andragogis*), konstruktif dan lingkungan. Program pembelajaran Paket B pada Kasus 1, dilakukan melalui sistem pembelajaran tatap muka, tutorial dan mandiri. Alokasi waktu pembelajaran tatap muka secara klasikal di Kelompok Belajar Paket B SKB Limboto Kabupaten Gorontalo berjumlah 24 Jam pelajaran per minggu atau 3 hari efektif belajar per minggu.

d. Metode Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran diksetara paket B digunakan metode belajar orang dewasa (*andragogy*). Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran.

Pertama, pengaturan lingkungan fisik. Pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu unsur dimana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman dan mudah. Untuk itu perlu dibuat senyaman mungkin: (1) penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa; (2) alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa; dan (3) penataan ruangan, pengaturan meja, kursi dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

Kedua, pengaturan lingkungan sosial dan psikologis. Iklim psikologis hendaknya merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai dan didukung. Untuk itu diperlukan: (a) fasilitator lebih bersifat membantu dan mendukung, (b) mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai, (c) menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut, (d) mengembangkan semangat kebersamaan,

(e) menghindari adanya pengarahannya dari siapapun, dan (f) menyusun kontrak belajar yang disepakati bersama.

Ketiga, diagnosis kebutuhan belajar. Dalam *andragogi* tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga/peserta belajar di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya: (a) melibatkan seluruh pihak terkait (*stakeholder*) terutama pihak yang terkena dampak langsung atas kegiatan itu, (b) membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi ideal yang diharapkan, (c) menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan, dan (d) melakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, misalkan kompetensi tertentu.

Keempat, proses perencanaan. Dalam perencanaan pendidikan hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pendidikan tersebut. Tampaknya ada suatu "hukum" atau setidaknya-tidaknya suatu kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan merasa 'committed' terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperan serta dalam pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan: (a) libatkan peserta untuk menyusun rencana pendidikan, baik yang menyangkut penentuan materi pembelajaran, penentuan waktu dan lain-lain; (b) temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait menyangkut pendidikan tersebut; (c) terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam tujuan yang diharapkan dan ke dalam materi belajar; dan (d) tentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak terkait siapa melakukan apa dan kapan.

Kelima, memformulasikan tujuan. Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Dalam setiap proses belajar, tujuan belajar hendaklah mencakup tiga hal pokok yakni: (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotorik.

Keenam, mengembangkan model umum. Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari perencanaan pendidikan dimana harus disusun secara harmonis antara beberapa kegiatan belajar seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan materi dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan waktu

dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang sesuai.

Ketujuh, menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Dalam menetapkan materi dan metode atau teknik pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) materi pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta belajar; (b) materi belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Bukan berarti materi yang disusun hanya bersifat pragmatis; (c) metode dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta, tetapi akan lebih baik jika bersifat mendorong ketajaman analisis dan metodologi; dan (d) metode dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun lebih bersifat partisipatif, atau dalam bahasa Freire "dialogis".

Kedelapan, peranan evaluasi. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa yakni: (a) evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran / pelatihan, (b) sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta belajar itu sendiri (*Self Evaluation*); (c) perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan; (d) ruang lingkup materi evaluasi "ditetapkan bersama secara partisipatif" atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat; (e) evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program; dan (f) menilai efektifitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan perilaku.

e. Ketuntasan belajar, penilaian prestasi, dan kenaikan tingkatan

Pada Kasus 1, dan Kasus 2, ketuntasan belajar setiap indikator yang dikembangkan sebagai suatu pencapaian hasil belajar dari suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Pengelola Kelompok belajar harus menentukan kriteria ketuntasan minimal sebagai target pencapaian kompetensi (TPK) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kelompok belajar secara bertahap dan berkelanjutan selalu mengusahakan peningkatan kriteria ketuntasan belajar untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Kenaikan tingkatan dan derajat dilaksanakan pada setiap akhir pencapaian kompetensi. SKB membagi satu tingkatan dan derajat dalam beberapa

satuan waktu yang pada akhir satuan waktu tersebut diadakan penilaian hasil belajar sebagai wujud dari pencapaian Standar kompetensi.

Setelah semua standar kompetensi dapat dicapai dilakukan kenaikan tingkatan dan derajat dengan kriteria kenaikan yang berlaku di kelompok belajar SKB adalah setelah peserta didik memenuhi persyaratan berikut, yaitu: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran satu tingkatan dan derajat; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan (c) mempertimbangkan kehadiran dalam tatap muka mencapai minimal 70%.

f. Kriteria Keberhasilan dan Penentuan Kelulusan

Dengan mengacu kepada ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan Paket B Setara SMP SKB Limboto setelah memenuhi persyaratan berikut, yaitu: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan (c) lulus ujian nasional semua mata pelajaran yang diujikan;

Kriteria Keberhasilan dan Penentuan kelulusan dengan kriteria sebagai berikut : (1) memiliki laporan kemajuan belajar (rapor) Paket B; (2) telah mengikuti ujian pada SKB Limboto Kabupaten Gorontalo dan memiliki nilai untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, minimal nilai masing-masing mata pelajaran 6,00; (3) lulus ujian nasional sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku; (4) peserta didik yang dinyatakan lulus diberi ijazah; dan (5) peserta didik yang tidak lulus tidak memperoleh ijazah dan mengulang di tingkat IV dan ujian nasional periode berikutnya.

g. Faktor penghambat dan pendukung

Faktor potensi pendukung yaitu sebagai berikut: (a) jumlah SD/MI sekitar 12 sekolah, (b) jumlah pamong belajar dan pegawai serta latar belakang pendidikan memadai, (c) fasilitas belajar cukup memadai, (d) sarana olahraga, dan (e) perhatian pemerintah daerah terhadap program pendidikan nonformal cukup tinggi terbukti dengan tersedianya alokasi dana pendidikan yang cukup memadai

Sedangkan potensi penghambat yaitu sebagai berikut: (a) kehadiran warga belajar tidak terus

menerus, (b) kurangnya kesadaran akan pendidikan, (c) warga belajar masih ada beranggapan bahwa pendidikan Non Formal belum setara dengan pendidikan Formal, (d) mereka lebih mementingkan untuk mencari nafkah ketimbang belajar, (e) masih kurangnya sarana pendidikan, dan (f) sulitnya mendapatkan modul khusus nonformal.

g. Penilaian Pendidikan Kesetaraan dan Report

Pendidikan kesetaraan menggunakan penilaian otentik dan berkesinambungan. Penilaian otentik mendokumentasikan pencapaian kompetensi dan kinerja peserta didik sebagai bagian integral dari pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh. Uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan alat penilaian.

Hasil penilaian dapat digunakan untuk melengkapi hasil tes penempatan darjah yang menentukan posisi pencapaian peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah (pusat penilaian pendidikan, badan penelitian dan pengembangan) bertujuan untuk menilai pencapaian SKL secara nasional pada mata pelajaran tertentu pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Setelah penilaian akhir atau ujian nasional akan memberikan sertifikasi sebagai tanda telah menyelesaikan sesuatu jenjang pendidikan kesetaraan.

Titik berat program berkaitan dengan upaya penentuan prioritas unsur-unsur program yang termasuk ke dalam komponen, proses atau tujuan program. Sumber-sumber program mencakup sumber daya alam dan lingkungan, kebijakan dan peraturan, dan kerjasama antar lembaga penyelenggara program. Perolehan program meliputi keluaran yaitu perubahan perilaku peserta serta pengaruh program bagi peningkatan kesejahteraan peserta didik, pembelajaran orang lain dan partisipasi lulusan dalam pembangunan masyarakat. Hasil evaluasi

tersebut menjadi masukan untuk pertimbangan dan keputusan bagi perencanaan program, alokasi sumber-sumber sebagai daya dukung, jalinan kemitraan, dan sosialisasi program.

Aspek-aspek yang dinilai ialah: (1) tujuan belajar, (2) kelompok belajar, (3) warga belajar, (4) sumber belajar, (5) kegiatan belajar, (6) bahan belajar, (7) panti belajar, (8) sarana belajar, (9) dana belajar, dan (10) ragi belajar. Dari beberapa pendapat di atas mengenai aspek-aspek atau unsur-unsur dalam suatu program pendidikan nonformal atau lebih khususnya pada program pembelajaran dapat disimpulkan bahwa unsur yang dapat dievaluasi pada program pembelajaran adalah unsur komponen, proses dan hasil program. Unsur-unsur tersebut secara umum dapat dirincikan secara lebih luas dengan aspek-aspek yang mendukung suatu program pembelajaran. Program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dan atau organisasi (lembaga) yang memuat komponen-komponen program. dan pembelajaran adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi. Program pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok guna memperoleh pendidikan dan atau keterampilan yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek.

Untuk melakukan penilaian program kesetaraan adalah model Donald Kirkpatrick. Empat level evaluasi didalam pelaksanaan program penilaian terdiri dari:

1. Reaksi - bagaimana peserta didik bereaksi terhadap proses pembelajaran
2. Belajar - sejauh mana peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Perilaku - kemampuan untuk melakukan keterampilan yang dipelajari saat pekerjaan
4. Hasil - termasuk item seperti efisiensi moneter, moral, dan lain-lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan kesetaraan memang berada dalam posisi "pinggiran". Hal itu diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar peserta didik di sini adalah anak-anak miskin, berhenti sekolah di tengah jalan, atau orang dewasa yang belum pernah menamatkan pendidikan dasar dan menengah. Fenomena itu mesti diterima sebagai tantangan untuk memperbaiki citra itu. Semestinya hal itu menjadi pemacu semua pihak untuk menjadikan program tersebut memiliki daya tarik, yang siap bersaing dengan jalur persekolahan, bahkan

mampu menempatkan diri sebagai "jalur pendidikan dasar dan menengah alternatif". Artinya, sebagai cara lain bersekolah untuk dapat memberikan yang berbeda dan lebih dari apa yang diberikan sekolah. Para peserta didik lebih membutuhkan bekal keterampilan untuk secepatnya mendapatkan pekerjaan. Dalam perspektif ini. Diksetara yang bermutu tentulah yang dapat memberikan keterampilan relevan sehingga mereka cepat dapat bekerja setelah lulus.

Pendidikan kesetaraan berhasil dalam beberapa hal. *Pertama*, meningkatnya jumlah peserta didik.

Kedua, meluasnya keragaman karakteristik sasaran program. *Ketiga*, meluasnya jangkauan akses pendidikan kesetaraan. *Keempat*, meningkatnya jumlah peserta dan lulusan. *Kelima*, meningkatnya rata-rata nilai hasil ujian nasional. *Keenam*, bervariasinya satuan pendidikan program Paket B. *Ketujuh*, berkembangnya inovasi pendidikan kesetaraan, termasuk model jemput bola dan sekolah rumah (*homeschooling* dan *e-homeschooling*). Kedelapan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan kesetaraan akibat keterlibatan berbagai pihak (legislatif, selebriti, Tokoh agama, pegiat) dalam sosialisasi pendidikan kesetaraan.

Program Paket B meliputi Tingkatan 3 dengan derajat kompetensi Terampil 1 setara dengan kelas 8 SMP/MTs. Penekanannya pada penguasaan dan penerapan konsep-konsep abstrak secara lebih meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, serta memecahkan masalah dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial yang lebih luas. Tingkatan 4 dengan derajat kompetensi Terampil 2

setara dengan kelas 9 SMP/MTs. Di sini menekankan peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, sehingga peserta didik mampu secara aktif mengekspresikan diri dan mengkomunikasikan karyanya melalui teks secara lisan dan tertulis berdasarkan data dan informasi yang akurat secara etis, untuk memenuhi tuntutan keterampilan dunia kerja sederhana dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi.

Perumusan pendidikan nonformal dalam penelitian ini proses pendidikan yang tidak hanya membekali warga belajarnya dengan sejumlah kemampuan (pengetahuan, sikap, dan lain-lain) melainkan juga mempersiapkan warga belajarnya untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya di tengah masyarakat. Namun demikian PNF juga mengutamakan pelayanan kebutuhan individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan pribadi mereka melalui proses pendidikan sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banghart, Frank W, & Albert Trull, Jr. (1973). *Educational planning*. New York: The Macmillan Company
- Daft, R. L., (2003). *Management*. Sixth Edition. Ohio: Thomson South-Western
- Data Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, 2011
- Emzir. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press
- Griffin, R.W (2006). *Business*. 8th Edition. NJ: Prentice Hall
- Kamil, M. (2010). *Pendidikan nonformal*. Bandung: Alfabeta
- Direktorat Kesetaraan Dirjen PNF (2007). *Petunjuk teknis: Standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan kesetaraan program paket A dan B*. Jakarta: Direktorat Kesetaraan Dirjen PNF.
- Robbins, S & Mary C. M. (2007). *Management*. 8th Edition. NJ: Prentice Hall
- Schermerhorn, John R., Jr., (2005). *Management*. Eighth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Siagian, S. P. (2003). *Filsafat administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert, Jr. (1995). *Management*. Sixth Edition. International Edition. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Barlet, R. (2003). *Vocational business: Training, developing and motivating people*. Business & Economics - 2003.
- Neuman.N.L (2000). *Social research method: Qualitative and quantitative approach*. Boston: Allyn & Bacon
- Walcott, H. F. (1994). *Transforming qualitative data (description, analysis and interpretation)*. London: Sage Publication
- Husain. W. (2011). *Participative leadership*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim Publishing.
- Zubaedi. (2007). *Pendidikan berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.